



PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JEMBER DALAM MELAYANI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PTSL UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELAYANAN

Husnul Kamila, Nur Hidayat

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: millahk4@gmail.com , Nur.hidayatbri@gmail.com

Abstract (English)

This study delves into the role of the Jember City National Defense Agency (BPN) in executing the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), with an emphasis on enhancing community services and legal certainty. Deep interviews and document analysis were used as part of the qualitative research methodologies to delve into relevant material. The mapping, data collecting, and land certificate issuance functions performed by Jember City BPN are vital, and they have the potential to greatly enhance service efficiency and legal certainty. By implementing the PTSL program, Jember City BPN contributes to a more secure land ownership system and better service delivery. This study provides a comprehensive overview of the PTSL Program's effects on communities that are mostly Muslim by investigating its Islamic legal dimensions as well. A fuller understanding of the program's viability and its applicability to Islamic legal principles is sought for by this examination. This study concludes by highlighting the strategic role of the Jember City BPN in enhancing community services and legal certainty via the PTSL Program.

Abstrak (Indonesia)

Kajian ini mendalami peran Badan Ketahanan Negara (BPN) Kota Jember dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan penekanan pada peningkatan pelayanan masyarakat dan kepastian hukum. Wawancara mendalam dan analisis dokumen digunakan sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif untuk menggali materi yang relevan. Fungsi pemetaan, pendataan, dan penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh BPN Kota Jember sangatlah penting dan berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepastian hukum. Dengan menerapkan program PTSL, BPN Kota Jember berkontribusi pada sistem kepemilikan tanah yang lebih aman dan pemberian layanan yang lebih baik. Studi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak Program PTSL terhadap masyarakat yang sebagian besar beragama Islam dengan menyelidiki dimensi hukum Islamnya juga. Pemahaman yang lebih lengkap mengenai kelayakan program dan penerapannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dicari melalui kajian ini. Kajian ini diakhiri dengan menyoroti peran strategis BPN Kota Jember dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kepastian hukum melalui Program PTSL.

Article History

Received: 15 February 2024

Reviewed: 20 February 2024

Published: 21 February 2024

Keywords: *National Defense Agency, PTSL Program, legal certainty, Community Service, Islamic law*

Sejarah Artikel

Received: 15 February 2024

Reviewed: 20 February 2024

Published: 21 February 2024

Kata Kunci: *Badan Pertanahan Nasional, Program PTSL, Kepastian Hukum, Pelayanan Masyarakat, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Dalam setiap pertumbuhan daerah, lahan merupakan komponen kunci. Ketersediaan dan efisiensi pengelolaan lahan tidak terlepas dari keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.

Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah telah mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya sendiri melalui penerbitan sertipikat tanah oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hak, kepastian objek dan kepastian



subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertipikat. Meningkatkan layanan administrasi pertanahan dan menetapkan hak hukum yang jelas atas kepemilikan properti adalah dua tujuan dari inisiatif ini.

Pusat pelaksanaan Program PTSL di daerah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jember. BPN Kota Jember diperkirakan akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan program karena posisinya sebagai organisasi yang berwenang di bidang pemetaan dan pengelolaan lahan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi BPN Kota Jember terhadap efektivitas Program PTSL, khususnya dalam hal peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat dan penetapan batasan hukum yang lebih jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas fungsi BPN Kota Jember sekaligus menelusuri apakah Program PTSL sesuai dengan prinsip hukum Islam atau tidak. Penerapan program ini terhadap prinsip-prinsip Islam tentang kepemilikan tanah sangat penting untuk dipahami mengingat sebagian besar penduduk Kota Jember beragama Islam. Di komunitas Islam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana Program PTSL telah mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dengan menggunakan metode kualitatif yang meliputi analisis dokumen dan wawancara mendalam, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterlibatan BPN Kota Jember dalam Program PTSL serta dampaknya terhadap pelayanan masyarakat dan kepastian hukum. Kami percaya bahwa penelitian kami dapat membantu membentuk kebijakan publik, memberikan ide-ide baru bagi akademisi dan praktisi di bidang pertanahan, dan memicu diskusi lebih lanjut tentang hukum Islam dalam konteks ini.

METODE

Melalui penggunaan analisis dokumen dan wawancara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk memahami secara utuh fungsi BPN Kota Jember dalam melaksanakan Program PTSL, dipandang perlu menggunakan metode kualitatif. Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Jember menjadi fokus utama kajian tersebut. Mereka yang bertanggung jawab atas Program PTSL di BPN dan mereka yang bekerja langsung dalam pelaksanaannya merupakan pihak yang memberikan respons utama. Responden dipilih berdasarkan keakraban mereka dengan program ini dan tingkat keahlian mereka di bidang tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi BPN Kota Jember dalam Program PTSL diperoleh melalui wawancara mendalam dengan peserta terpilih. Hasil wawancara didukung dengan analisis data administrasi, dokumen Program PTSL, dan peraturan BPN. Aturan program, laporan implementasi, dan dokumentasi formal lainnya merupakan bagian dari kumpulan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BPN Kota Jember dalam Program PTSL

Tanggung jawab pemetaan dan pendataan pertanahan di wilayah tersebut berada pada BPN Kota Jember. Dengan memikul tanggung jawab ini, BPN dapat membantu masyarakat mengetahui siapa pemilik suatu properti. Penyusunan sertifikat tanah yang sah dan halal sangat bergantung pada pemetaan yang akurat. Konversi data sistem informasi geografis (GIS) menjadi hak atas tanah merupakan fungsi penting BPN Kota Jember. Pemilik dapat merasa tenang mengenai kepemilikan propertinya dengan adanya sertifikat tanah. Meningkatnya kejelasan hukum merupakan dampak langsung dari partisipasi BPN Kota



Jember. Untuk membantu pengakuan hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat, BPN menerbitkan sertifikat tanah yang asli dan akurat..

Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pertanahan merupakan fungsi lain dari BPN Kota Jember. Peningkatan proses pemetaan, pengumpulan data, dan penerbitan sertifikat tanah akan memungkinkan BPN melayani masyarakat dengan lebih cepat dan akurat. Pendidikan masyarakat mengenai kepemilikan tanah, tanggung jawabnya, dan manfaat program dapat dicapai melalui inisiatif penjangkauan dan penjangkauan BPN.

Di luar fungsi administratifnya semata, keterlibatan BPN Kota Jember dalam Program PTSL mempengaruhi transformasi masyarakat dan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan dan kejelasan hukum. Oleh karena itu, Program PTSL merupakan kewajiban strategis BPN untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Jember.

Peningkatan Kepastian Hukum dan Pelayanan

Peningkatan Kepastian Hukum

Tingginya keabsahan hukum sertifikat tanah yang dihasilkan dijamin oleh BPN Kota Jember melalui pemetaan dan pengumpulan data yang komprehensif. Pemilik tanah mendapatkan manfaat dari hal ini karena sertifikat tersebut diakui oleh pihak berwenang sehingga memberikan kepastian hukum kepada mereka. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan mencakup seluruh unsur kepemilikan. Sengketa pertanahan dapat dihindari dengan bantuan kejelasan hukum Program PTSL. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan konflik kepemilikan properti adalah dengan memiliki sertifikat tanah yang jelas dan legal.

Menurut Bapak Budi prasetyo, S.H. selaku kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran : Jika tanahnya sudah disertifikatkan, harga jual akan naik. Beda tanah yang masih statusnya girik dengan tanah yang statusnya sertifikat. Jadi dia punya nilai ekonomi. Sertifikat itu seperti investasi jangka panjang. Dengan kita punya sertifikat, nilai tanah naik, nilai ekonomi naik, bisa dijaminkan ke bank,"

Peningkatan Kepastian Pelayanan

Sistem pendaftaran tanah yang efisien dan cepat ditetapkan oleh BPN Kota Jember sebagai bagian dari Program PTSL. Untuk menyederhanakan proses administrasi, hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan standarisasi prosedur. Masyarakat dan pemilik lahan akan lebih terlayani oleh solusi dan layanan BPN yang disesuaikan dengan kebutuhan, berkat data pemetaan yang akurat. Program PTSL yang diterapkan BPN Kota Jember membantu mengefektifkan proses administrasi pertanahan dengan memangkas biaya dan menghemat waktu. Alokasi sumber daya yang lebih efektif merupakan win-win solution bagi masyarakat dan entitas terkait. Efisiensi secara keseluruhan akan meningkat ketika layanan publik lebih mudah diakses dan dipahami.

Aspek Hukum Menurut Islam dalam Program PTSL

Aspek hukum Islam yang terkait dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencakup beberapa hal, seperti:

1. Masalah al-Mursalah: Konsep ini menyoroti pentingnya apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka PTSL, gagasan tersebut diwujudkan



dalam upaya pengamanan harta benda (Hifdzun Mal) melalui penerbitan sertifikat tanah yang memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah.

2. Verifikasi Kepemilikan Tanah: Dalam hal bukti tertulis tidak mencukupi, PTSL mengizinkan penggunaan pernyataan tertulis kepemilikan sah atas tanah. Hal ini sejalan dengan konsep Masalah al-Mursalah tentang pelestarian harta benda (Hifdzun Mal).
3. Bagian penting dari hukum Islam mengenai kepemilikan properti adalah pemberian sertifikat tanah, dan program PTSL berupaya memberikan kejelasan hukum mengenai kepemilikan tanah melalui proses ini.

Prinsip-prinsip pedoman hukum Islam—keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat—juga menjadi referensi dalam pelaksanaan program PTSL. Dari sudut pandang hukum Islam, penerapan PTSL telah menjadi bahan kajian beberapa kali.

Manfaat pendaftaran tanah

Manfaat pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan bukti yang kuat tentang keabsahan tindakan hukum yang terkait dengan tanah. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, pendaftaran tanah juga memiliki peran penting dalam menetapkan keabsahan tindakan hukum tersebut. Dengan kata lain, tanpa pendaftaran, tindakan hukum tersebut tidak akan dianggap sah menurut hukum¹

KESIMPULAN

Kajian ini menekankan pentingnya peran serta Badan Pertanahan Nasional Kota Jember dalam Program PTSL yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kepastian hukum. Dalam menjalankan Program PTSL, BPN Kota Jember menjadi penting. Kejelasan hukum dan efisiensi pelayanan administrasi pertanahan semakin ditingkatkan dengan keterlibatan aktif BPN dalam pemetaan, pengumpulan data, dan penerbitan sertifikat tanah. Kejelasan hukum kepemilikan tanah meningkat di BPN Kota Jember melalui Program PTSL. Sertifikat tanah yang mengikat secara hukum dan sah berfungsi untuk melindungi kepentingan pemilik tanah, memberikan dasar hukum yang kuat bagi properti mereka, dan mencegah perselisihan mengenai kepemilikan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pertanahan, BPN Kota Jember merupakan pemain penting. Menyederhanakan proses pendaftaran, menggunakan teknologi informasi, dan standarisasi prosedur semuanya berkontribusi pada penyederhanaan alur kerja, yang pada gilirannya mengurangi biaya dan menghemat waktu. Selain itu, dengan meliputi hukum Islam, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana program ini akan berjalan di masyarakat yang mendasarkan hukum dan etika pada prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. Sertifikat Hak Atas Tanah, (Sinar Grafika. 2012) 10
- Admin. (2022, September 17). *Sertipikat Tanah Berikan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Tingkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat*. Retrieved from Kantor Pertanahan Kabupaten Jember: <https://kab-jember.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/3968/sertipikat-tanah-berikan-kepastian-hukum-keadilan-dan-tingkatkan-nilai-ekonomi-masyarakat>
- Agraria. (2022, Desember 2). *Sosialisasi PTSL Jember: Sukseskan Program PTSL, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Retrieved from Kabar Notariat:



<https://kabarnotariat.id/2022/12/02/sosialisasi-pts-l-jember-sukseskan-program-pts-l-wujudkan-kesejahteraan-masyarakat/>

- Akbar. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). *Skripsi UIN Datokarama*.
- Indah Ayu Maulliana. (2022). HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.
- Nanda Elsa Safirah. (2022). Peran BPN Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala. *Tesis UIN Ar-Raniry*.
- Wiby Darmawan Elkas, Yani Pujiwati, Bambang Daru Nugroho (2023) program pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian Hukum Pada masyarakat adat minangkabau
- Nur Azizah. (2023). OPTIMALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA. *UNISSULA Institutional Repository*.
- Reynaldi Ode Junaidi. (2024, Januari 24). *PTSL Jember Tahun 2024 Sasar 35 Ribu Bidang Tanah*. Retrieved from Radio Republik Indonesia:
<https://www.rri.co.id/daerah/528176/pts-l-jember-tahun-2024-sasar-35-ribu-bidang-tanah>
- Siti Halimah. (2023). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. *Tesis Universitas Islam Sultan Agung*.
- Yessica Destiana Armelita. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO*.
- Zaenal Darmotannyono, Hadi Susanto, & Sri Mulyani. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 402-417.
- Deriska Wulanda Putri. (2021). Pelaksanaan Tanah sistematis lengkap di kabupaten bengkulu tengah perspektif hukum islam.
- Muchsin, Aspek Hukum Atas Tanah, (Varia Peradilan Majalah Hukum: Jakarta, 2006), h.10
- Nur azizah, Abdul Mahsyar, Ruskin Azikin (2022) Kualitas Pelayanan administrasi pertanahan Di Kementerian ATR/BPN Kabupaten Bantaeng.